

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH  
KELOMPOK NELAYAN DI DESA LONTAR  
KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN  
TANGERANG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :**

**IRFAN MAKHOPA  
NPM. 1541020011**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH  
KELOMPOK NELAYAN DI DESA LONTAR  
KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN  
TANGERANG**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

**Oleh :**

**IRFAN MAKHOPA  
NPM 1541020011**

**Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. M.A. Achlami, HS. MA**

**Pembimbing II : M. Apun Syarifuddin, S.Ag, M.Si.**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Masyarakat nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ikan maupun budidaya. Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat tradisional yang lebih efektif dan efisien agar tidak tertinggal dengan masyarakat modern. Karena salah satu faktor penyebab kemiskinan nelayan adalah ketertinggalan teknologi, karena selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup diatas air, oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan para nelayan.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kemiskinan nelayan yang disebabkan ketertinggalan teknologi nelayan, termasuk masyarakat nelayan Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Nelayan terhadap masyarakat nelayan Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisa data yang meliputi beberapa tahap yaitu: tahap reduksi, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan, jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 73 orang, untuk menentukan sampel teknik yang digunakan *Purposive Sampling*. Adapun dari pengambilan sampel penulis mengambil 12 orang pendamping nelayan yang diambil dari pengurus kelompok nelayan dan 1 orang fasilitator pemberdayaan masyarakat nelayan dan 5 masyarakat nelayan, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 18 orang.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejatinya meningkatkan hasil laut dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang salah satunya melalui teknologi *Global Positioning System* (GPS) dimana GPS dapat membantu para nelayan yaitu ketika melaut tidak tersesat, mempermudah nelayan dalam mengetahui koordinat lintang bujur, arah dan kecepatan. Selain itu, bermanfaat juga untuk mengetahui posisi saat di laut: menentukan rute perjalanan, menandai tempat-tempat penting seperti tempat yang banyak ikan, dangkal, dan sebagainya. Sehingga dengan GPS akan bisa menghemat BBM karena rute bisa ditentukan sehingga kemungkinan untuk salah arah sangat kecil.

**Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Kelompok Nelayan**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Letnan Kolonel Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎ 0721-704030

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang  
**Nama** : Irfan Makhopa  
**NPM** : 1541020011  
**Jurusan** : Pengembangan Masyarakat Islam  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. MA Achlami, HS. MA**  
**NIP. 195501141987031001**

Pembimbing II

**M. Anun Syarifuddin, S. Ag, M. Si**  
**NIP. 197209291998031003**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

**Dr. H. M. Mawardi J, M.Si**  
**NIP. 196612221995031002**





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Letnan Kolonel Hi. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎ 0721-704030

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**  
**OLEH KELOMPOK NELAYAN DI DESA LONTAR KECAMATAN**  
**KEMIRI KABUPATEN TANGERANG** Disusun oleh : **IRFAN MAKHOPA,**

NPM : 1541020011, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Telah di  
ujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada  
hari Senin tanggal 18 November 2019.

**TIM PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. H. M. Mawardi J, M.Si.

Sekretaris : Ade Nur Istiani, M.I.Kom.

Penguji I : Dr. H. M. Saifuddin, M.Pd.

Penguji II : Prof. Dr. H. MA. Achlami HS, MA.

Penguji Pendamping : M. Apun Syaripudin, S.Ag., M.Si.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002





## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Makhopa  
NPM : 1541020011  
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang**, adalah hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain kecuali bagian-bagian tertentu penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila ternyata dikemudian hari terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6000

Irfan Makhopa  
NPM. 1541020011

## MOTTO

لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  
لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا  
مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

(Q.S Ar-Ra'd:11)

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ibunda Ibu Khalimah, dan Ayahanda Alm. Bapak Saderi atas pengorbanan selama ini sejak masih dalam kandungan sampai usia sekarang, yang tidak pernah lelah dan bosan mendo'akan untuk kesuksesan anak-anaknya, hanya Allah yang bisa membalas segalanya.
2. Kakak laki-lakiku, Amirudin, Kasmuni, Achmad Saepudin dan Kakak perempuanku, Nova Amelia, dan Siti Aisyah yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan studi serta mendo'akan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
3. Adikku tersayang Siti Futahah dan Abdul Aziz yang senantiasa memberi do'a dan dorongan untuk menggapai cita-cita.
4. Pembina sekaligus orang tua yang selalu membina dan memotivasi penulis Bapak Prof. Dr. H. MA Achlami, HS. MA. Dan Bapak M. Apun Syarifuddin, S.Ag., M.Si, banyak pengorbanan dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga kebaikan bapak dicatat sebagai amal soleh dan menjadi amal jariyah diakhirat kelak.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan berbagai Ilmu dan pengetahuan dengan ikhlas, semoga ilmu yang diberikan selama ini menjadi amal jariyah bapak dan ibu semua.



6. Keluarga Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi (AMPIBI) UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga Himpunan Qori-qoriah Mahasiswa (HIQMA) UIN Raden Intan Lampung.
8. Patner ku, Raden Ayu yang selalu mensupport untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku yang sudah seperti keluarga bagiku; Agus Siswanto, Angelia Ramadhani, Devi Syilfiani, Diana Lorenza, Ghiffari Ananda Gumay, Hesti Nursahadatillah, Rifky Widayuni, Suci Alhaj Munita
10. Teman-teman seperjuangan PMI A 2015, dan KKN 175 Rulung Mulya
11. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## **RIWAYAT HIDUP**

Irfan Makhopa, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 25 Mei 1996, anak keenam dari delapan bersaudara. Lahir dari pasangan Ibu Khalimah dan Alm. Bapak Saderi. Alhamdulillah Allah SWT mengamanahkan 8 bersaudara kepada pasangan tersebut. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah :

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Selatip, Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, lulus pada tahun 2009
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Halimiyah, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, lulus pada tahun 2012
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 4 Tangerang, Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, lulus pada tahun 2015
4. Pada tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan ke Program S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Selama Penulis berada di jenjang pendidikan, penulis mengikuti beberapa organisasi, seperti UKM-HIQMA, UKM Ittihad, AMPIBI, HMJ-PMI.

Penulis juga mengikuti beberapa pelatihan, yaitu;

1. Pelatihan Membangun Karakter Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal oleh HMJ PMI, tahun 2015
2. Pelatihan Khotib dan Imam oleh UKM-F Rumah Da'i, tahun 2015
3. Pelatihan "One Day TOEFL Training" oleh UKM Bahasa, tahun 2017
4. Pelatihan Jurnalistik oleh AMPIBI, tahun 2018
5. Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris oleh Fakultas Dakwah, tahun 2019
6. Pelatihan Manajemen Masjid oleh DT Peduli dan BNI Syariah, tahun 2019

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan. Dengan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, Sahabat dan kita selaku Ummatnya yang menantikan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Mawardi J, M.Si selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Bapak H. Zamhariri, S.Ag., M.Sos.I selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. H. MA Achlami, HS. MA. Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Apun Syarifuddin, S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bantuan, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.



4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan Ilmu dan arahan pada penulis.
6. Pihak Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, serta Perpustakaan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam yang telah menyediakan buku-buku referensi.
7. Kepala Desa Lontar beserta jajarannya, juga masyarakat Desa Lontar yang bersedia memberikan Informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

Bandar Lampung, November 2019  
Penulis

**Irfan Makhopa**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilh Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Metode Analisis Data .....	15
H. Tinjauan Pustaka .....	16
<b>BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN</b>	
A. Pemberdayaan Masyarakat .....	
1. Pengertian Pemberdayaan.....	19
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan.....	22
3. Tujuan Pemberdayaan .....	23
4. Proses Pemberdayaan .....	25
5. Indikator Keberdayaan .....	28
B. Kemiskinan Nelayan .....	
1. Pengertian Kemiskinan .....	31
2. Permasalahan Nelayan .....	33
3. Dimensi Kemiskinan Nelayan .....	36
C. Teori Konstruksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan .....	50
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA LONTAR DAN PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN</b>	
A. Desa Lontar .....	

1. Sejarah Terbentuknya Masyarakat Lontar .....	57
2. Kondisi Geografis dan Demografis .....	58
3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	61
4. Kondisi Sosial Budaya .....	63
5. Kondisi Sosial Keagamaan .....	65
 B. Kelompok Nelayan Desa Lontar	
1. Sejarah Singkat Kelompok Nelayan .....	67
2. Struktur Pengurus Kelompok Nelayan .....	68
3. Visi dan Misi Kelompok Nelayan .....	68
4. Program Kelompok Nelayan .....	68
 C. Proses Pemberdayaan Masyarakat Nelayan	
1. Tahap Penyadaran .....	69
2. Tahap Pengkapasitasan .....	72
3. Tahap Pendayaan .....	73
 <b>BAB IV ANALISIS DATA</b>	
A. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan Desa Lontar .....	75
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
C. Penutup .....	82
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	59
2. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	59
3. Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	60
4. Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian .....	62
5. Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Nelayan Berdasarkan Kelasnya .....	62
6. Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis .....	63
7. Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi dan Dokumentasi
3. Daftar Nama Sampel
4. Surat Keputusan Tentang Judul Skripsi
5. Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Penelitian Dari Desa Lontar
8. Kartu Hadir Munaqosah
9. Kartu Hadir Konsultasi
10. Foto Kegiatan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dan pengertian pembaca serta untuk memudahkan pemahaman maksud judul *“Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”*, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul tersebut :

**Pemberdayaan** atau pemberi kekuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkannya pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>1</sup>

Menurut Ginanjar Kartasasmita pemberdayaan itu suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>2</sup>

Jadi, yang dimaksud pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun sosial.

---

<sup>1</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 57-58

<sup>2</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 1996), h. 145



**Masyarakat nelayan** adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut baik dengan cara melakukan penangkapan ikan. Mereka pada umumnya tinggal dipantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.<sup>3</sup>

Menurut Kusnadi masyarakat nelayan adalah masyarakat yang secara geografis hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir; yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat nelayan adalah suatu komunitas yang mana mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan, yang tinggal di daerah pesisir dengan menggunakan perahu atau kapal berburu.

Sedangkan masyarakat nelayan yang dimaksud penulis disini adalah masyarakat nelayan yang berada di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

**Kelompok nelayan** adalah sekelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Jadi, yang dimaksud kelompok nelayan adalah kumpulan orang-orang yang aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan bermata pencaharian penangkap ikan dengan kebutuhan gotong royong dan saling tolong menolong.

Sedangkan kelompok nelayan yang penulis maksud disini adalah masyarakat kelompok Nelayan yang berlokasi di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, dimana kelompok nelayan Lontar tersebut memiliki

---

<sup>3</sup>Septi Rindawati. *Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi, Vol. 2 No.3 2012

<sup>4</sup> Kusnadi, *Membela Nelayan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Hal. 05

kesadaran sebagai masyarakat yang bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian melalui pemberdayaan untuk meningkatkan hasil lautnya.

Dengan demikian dari penegasan judul diatas dapat disimpulkan maksud judul penelitian penulis adalah suatu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Desa Lontar dan Fasilitator IBM Indonesia kepada masyarakat nelayan desa Lontar dalam meningkatkan hasil laut dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan seperti penyadaran, pengembangan kapasitas dan penggunaan teknologi untuk nelayan.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat tradisional yang lebih efektif dan efisien agar tidak tertinggal dengan masyarakat modern. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Masyarakat nelayan di Desa Lontar memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan skill khususnya dalam bidang nelayan yang di gerakkan oleh kelompok nelayan desa Lontar
2. Penelitian ini dalam rangka pengembangan keilmuan pada fakultas dakwah jurusan pengembangan masyarakat islam, sebab penelitian ini berusaha mengkaji tentang suatu pemberdayaan masyarakat.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 buah yang dikelilingi oleh garis pantai sepanjang 81.000 Km dan luas laut sekitar 5.8 juta kilometer persegi dengan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2.78 juta Km<sup>2</sup>. Ada sekitar 60 juta Penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan penyumbang sekitar 22 persen dari pendapatan bruto nasional. Tak bisa dipungkiri ditengah potensi besar lautan justru kemiskinan banyak terletak dipemukiman nelayan. Memang banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan baik secara alamiah, struktural, maupun kultural.

Secara alamiah laut memang sulit diprediksi. Gelombang tinggi, angin kencang atau badai, serta rusaknya alam membuat hasil tangkapan semakin sedikit. Di satu sisi masyarakat nelayan mempunyai kelemahan secara struktural. Kemampuan modal yang lemah, manajemen rendah, kelembagaan yang lemah, dibawah cengkaman tengkulak dan keterbatasan teknologi.

Kondisi kultural juga bisa mendorong nelayan semakin terjun ke jurang kemiskinan. Kekayaan alam yang besar sering meninabobokan kita semua. Ketergantungan pada sumber daya laut mengakibatkan terjadi kepasrahan, dan ini berakibat tidak adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Oleh karena itu salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kepentingan di dalam arena

segenap aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan hanya meliputi penguatan individu juga pranata-pranata sosialnya.

Hal ini sejalan dengan firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat Islam khususnya, sebagaimana termaktub dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya : "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia".*

Dari ayat di atas ada indikasi bahwa Allah tidak akan merubah keadaan mereka (kaum) selama mereka (kaum) tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka, maksudnya Allah menyuruh atau mengajak kita agar mau berusaha dalam menghadapi permasalahan yang ada, tidak lengah dan mudah putus asa yang mana pada dasarnya Allah tidak akan memberikan cobaan atau musibah kepada

hambanya diluar kemampuan dan Allah tidak merubah nasib hambanya selama hamba tersebut tidak mau berusaha dan bertindak yang lebih baik lagi.

Allah juga akan murka dan marah pada hambanya yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan hanya pasrah saja dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dengan ini diharapkan masyarakat nelayan mampu untuk berusaha hidup agar lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya, mereka pada umumnya tinggal dipinggir pantai. Dalam kehidupan masyarakat nelayan, ikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang termasuk pangan serta lauk pauk yang menjadikan pokok penghasilan dari para nelayan, termasuk masyarakat nelayan di Desa Lontar.

Masyarakat nelayan memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari masyarakat lain dan nelayan identik dengan kemiskinan, banyaknya jumlah anak dalam keluarga dan pendidikan yang rendah.<sup>5</sup> Kemiskinan nelayan disebabkan oleh pendidikan yang rendah, sehingga tingkat teknologi, inovasi dan penyerapan informasi menjadi rendah yang menyebabkan produktivitasnya menjadi rendah. Menurut Kusnadi penyebab lain terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan adalah tekanan kehidupan yang dihadapi oleh fluktuasi musim ikan, keterlibatan kemampuan teknologi penangkapan, jaringan pemasaran yang dianggap merugikan nelayan serta sistem bagi hasil yang timpang sehingga

---

<sup>5</sup> Kusnadi, *Membela Nelayan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) Hal. 15

nelayan tradisional dan nelayan buruh merupakan kelompok sosial yang paling terpuruk tingkat kesejahteraan hidupnya. Masyarakat nelayan lemah dari aspek ekonomi dan sosial seperti pendapatan, pendidikan bahkan teknologi. Pendapatan yang diperoleh nelayan tidak menetap dan terkadang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat latar belakang masalah yang ada di Desa Lontar yaitu Kemiskinan nelayan yang disebabkan oleh salah satu faktor yakni keterbatasan teknologi.

Desa Lontar terletak dipinggiran laut Jawa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 5744 jiwa, dan sebanyak 2872 berprofesi sebagai nelayan artinya lebih dari separuh jumlah penduduknya hidup, tinggal dan menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan. Permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan di Desa Lontar ini terutama untuk nelayan kecil adalah masih menggunakan perahu tradisional hal ini berpengaruh terhadap daya jangkauan sehingga berdampak pula pada jumlah tangkapan ikan. Kemudian minimnya teknologi penangkapan ikan seperti Fish Finder, GPS, dll. Padahal nelayan-nelayan di industri besar sudah menggunakan teknologi ini sehingga mereka dapat meningkatkan hasil laut mereka.

Namun disamping permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Lontar, hadirnya Kelompok Nelayan di Desa ini menjadi sebuah tonggak yang bisa mengangkat harkat dan eksistensi nelayan yang ada di Desa Lontar. Kelompok Nelayan di Desa Lontar ini Bermula dari bantuan peralatan nelayan dari pemerintah pada tahun 2010, masyarakat nelayan Desa Lontar yang tergabung



dalam himpunan nelayan se Indonesia mendirikan perkumpulan yang mana guna membentuk kelompok nelayan. Awal mula berdiri kelompok nelayan dinamakan kontak nelayan. Dan setelah itu berubah dan terbentuk menjadi kelompok nelayan. Kelompok Nelayan ini menjadi wadah bagi para nelayan khususnya nelayan kecil yang mengalami persoalan-persoalan dalam melaut, kendala-kendala dalam meminjam modal, kesadaran akan potensi alam, serta penggunaan teknologi nelayan guna meningkatkan hasil laut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti Upaya yang dilakukan oleh Komunitas Nelayan Desa Lontar dalam memberdayakan masyarakat nelayan, dan mengkajinya lebih lanjut terhadap tema tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Proses pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang?

#### **E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang pemberdayaan masyarakat nelayan.
2. Secara praktis, penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat nelayan umumnya bagi masyarakat awam agar bisa mengetahui pentingnya suatu pemberdayaan bagi masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui suatu permasalahan agar hasil penelitian dilaksanakan dapat mencapai hasil optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian.

### **a. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya bahwa penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>6</sup> Artinya peneliti mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh kelompok nelayan di Desa Lontar kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

---

<sup>6</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta : Logos), 1997. Hal.4.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitiannya hanya semata-mata melukiskan objek tertentu. Menurut Koentjaraningrat, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.<sup>7</sup> Dalam kaitan dengan penelitian ini menggambarkan apa adanya, tentang hal-hal yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

### **b. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian,<sup>8</sup> atau keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia, populasi dalam penelitian ini adalah Pengurus Kelompok Nelayan 12 orang, Fasilitator IBM (*International Business Machines*) Indonesia 1 orang, dan nelayan yang mengikuti pelatihan berjumlah 60 orang, sehingga populasi keseluruhan dalam penelitian ini berjumlah 73 orang.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah: “Sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia), 1993. Hlm.30.

<sup>8</sup> Irawan Suehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya), 1995, Cet. Pertama. Hlm. 35.

menggunakan teknik tertentu.”<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non random sampling*, yaitu tidak semua individu dalam populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.<sup>10</sup>

Secara teknis dalam penarikan sampel, penulis menggunakan teknik *Purposive sanpling*. *Purposive sampling* yaitu dengan mengambil orang-orang yang benar-benar terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.<sup>11</sup> Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang akan dijadikan sampel sebagai berikut :

- 1) Fasilitator IBM Indonesia
  - a) Ketua bidang Program Pemberdayaan
- 2) Kelompok Nelayan
  - a) Warga asli Desa Lontar
  - b) Ketua bidang dalam kelompok nelayan
  - c) Memahami sejarah kelompok nelayan

---

<sup>9</sup>Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa,1987),h.193

<sup>10</sup>Sutrisno Hadi. *Op.Cit*,h.80

<sup>11</sup> Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia), 1993. Hlm.30.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.109

- d) Memahami kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan
  - e) Menjadi Pendamping dalam proses pelatihan
- 3) Masyarakat Nelayan Desa Lontar
- a) Warga asli desa Lontar
  - b) Minimal 10 tahun tinggal didesa Lontar
  - c) Berprofesi sebagai nelayan
  - d) Memahami sejarah Desa Lontar dan Kelompok Nelayan Lontar
  - e) Mengikuti proses pemberdayaan masyarakat nelayan

Berdasarkan identifikasi tersebut, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Fasilitator IBM Indonesia 1 orang, Pengurus kelompok nelayan 12 orang, dan masyarakat nelayan Desa Lontar 5 orang. Adapun jumlah sampel yang penulis tentukan berjumlah keseluruhan 18 orang.

### **c. Metode Pengumpul Data**

Dalam usaha menghimpun data dari lokasi penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

#### **1. Metode Observasi**

Pengertian observasi adalah sebagai pengamat dan mencatat dengan sistematis fenomena – fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan baik yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti melalui angket dan tes.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *observasi partisipan*, yaitu melakukan observasi yang melibatkan peneliti secara langsung dalam

---

<sup>13</sup>*Ibid*,h.136

kegiatan pengamatan untuk memperoleh data dan informasi lapangan dengan melibatkan diri, atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati.<sup>14</sup> Data yang ingin dihimpun melalui observasi partisipan ini adalah pemberdayaan masyarakat nelayan dalam tahap proses pemberdayaan dan tujuan dari pemberdayaan.

## 2. Interview (Wawancara)

Metode interview merupakan salah satu teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Hal ini dijelaskan oleh Sutrisno Hadi sebagai berikut : “interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu.”<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis berusaha melakukan pengumpulan data melalui wawancara, atau dialog terhadap orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>16</sup>

Menurut jenisnya interview dibedakan menjadi tiga yaitu : “interview terpimpin, interview tidak terpimpin dan interview bebas terpimpin.”<sup>17</sup> Jenis interview yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin, di mana pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun

---

<sup>14</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h.193

<sup>16</sup> Kartono Kartini, *Pengantar Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h.49

<sup>17</sup> *Ibid*, h.193



responden dapat memberikan jawabannya secara bebas atau tidak dibatasiruang lingkupnya, selagi tidak menyimpang dari pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya.

Dengan interview ini sebagai metode pokok dalam menggali data yang berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program nelayan pintar oleh koperasi nelayan didesa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

### **3. Metode Dokumentasi**

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar majalah dan sebagainya.<sup>18</sup> Penulis menggunakan metode ini mengharapkan menemukan data yang berkenaan tentang:

1. Sejarah berdirinya Desa Lontar
2. Sejarah berdirinya Kelompok Nelayan Desa Lontar
3. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pelatihan
4. Data-data yang berkaitan dengan subyek/obyek yang akan diteliti.

Agar lebih lengkap, dalam hal ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung oleh peneliti, dan tentunya terkait langsung dengan pokok bahasan.<sup>19</sup> Data primer dimaksud adalah dengan menggunakan interview sebagai sumber utama, sedangkan observasi serta dokumentasi sebagai data pendukung

---

<sup>18</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11.

<sup>19</sup> Cholid Nurboko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, (Bumi: Aksara,1998),h.43.

(sekunder). Dalam hal ini ada catatan – catatanyang peneliti dapat dari hasil diskusi penulis dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.

## **G. Metode Analisis Data**

Setelah seluruh data terkumpul, maka proses selanjutnya merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan penelitian yaitu analisis data. Adapun jenis metode analisa data yang peneliti gunaka ialah analisis data kualitatif.

Di dalam kutipan buku Sugiyono (2010), miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction, data display, dan data consulusion drawing/verification.*<sup>20</sup>

### **a. Reduksi**

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, member kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan.<sup>21</sup>

Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar, kemudian memilah-milahnya kedalam katagori tertentu.

### **b. Penyajian Data**

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarnya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta 2010) hal 246

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973 ),hal 75

dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami.<sup>22</sup>

Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini yaitu Pemberdayaan Masyarakat.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ( verifikasi ) data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan dengan cara deduktif.<sup>23</sup>

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.<sup>24</sup>

### H. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Rahmatul Izza, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan Judul Penelitian : “Pemberdayaan Masyarakat

---

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Ibid.*, hal.75

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Ibid.*, hal.75

Nelayan Di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat.”<sup>25</sup> Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPPP Tegal dalam melalui penyadaran dan pelatihan kepada masyarakat agar mampu membuat proposal, dan membuat alat tangkap gill net. Perbedaan dengan skripsi yang penulis fokuskan yaitu penulis meneliti tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan kepada masyarakat nelayan melalui pelatihan penggunaan teknologi nelayan.

2. Skripsi Achmad Eko Wahyudi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul Penelitian : “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.”<sup>26</sup> Skripsi ini membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Desa Palang melalui penggunaan teknologi *Global Persation Sistem (GPS)*, serta hambatan-hambatan apa saja dalam proses pemberdayaannya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu penulis fokus hanya membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan melalui penggunaan *Global Persation Sistem (GPS)*.
3. Skripsi Neolitha Vantikasari, Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dengan

---

<sup>25</sup> Rahmatul Izza, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat*, Jurnal Skripsi, 2017

<sup>26</sup> Achmad Eko Wahyudi, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*. Jurnal Skripsi 2013

Judul Penelitian : “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Tuna Jaya Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.”<sup>27</sup> Skripsi ini membahas tentang Upaya yang dilakukan oleh kelompok nelayan Tuna Jaya dalam memberdayakan masyarakat nelayan yang ada ditrenggalek melalui kegiatan penguatan kelembagaan, sosialisasi, dan pelatihan keterampilan serta kendala-kendala dalam proses pemberdayaannya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis tulis yaitu penulis fokus meneliti pemberdayaan kelompok nelayannya melalui penggunaan teknologi *Global Persation Sistem (GPS)*.

Berdasarkan skripsi diatas, maka terlihat jelas perbedaan fokus penelitian skripsi dimana pada skripsi penulis yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Nelayan oleh Kelompok Nelayan di Desa Lontar Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang”, Skripsi ini membahas tentang bagaimana upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok nelayan Desa Lontar dalam memberdayakan masyarakat nelayan melalu pelatihan penggunaan teknologi fish finder.

---

<sup>27</sup> Neolitha Vantikasari, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Tuna Jaya Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*. Jurnal Skripsi 2017

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN**

#### **A. Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Defenisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat oleh sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Karena itu word bank mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll). Yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan

---

<sup>1</sup>Mardikanto totok dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 26



masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.<sup>2</sup>

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (*kekuasaan atau keberdayaan*). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.

Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dengan keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat berubah. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengertian yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Suharto yang dikutip oleh Agus Salim Pemberdayaan adalah :

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk tingkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrol atas, dan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 28.

mempengaruhi orang terhadap kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

- 3) Pemberdayaan menunjuk kepada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.<sup>3</sup>

Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik.

Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal, keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun non fisik.<sup>4</sup>

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya

---

<sup>3</sup> Edfvi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) h, 57-59

<sup>4</sup> Engking Soewarman Hasan, *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hal 56-57

## 2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan.<sup>5</sup> Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

### a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

### b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

### c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedapnkan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang

---

<sup>5</sup> Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetlands International – 1P, 2005), hal. 54

miskin sebagai objek yang tidak kemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan keswadayaannya.

Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

#### d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (misalnya

---

<sup>6</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hal. 68-69

persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna memahami tentang pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.<sup>7</sup>

Menurut Mardikanto, terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (*better bussiness*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 60

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>8</sup>

#### **4. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep “proses menjadi”, bukan “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan, yaitu:

- a. Tahap penyadaran. Yakni dimana masyarakat diberi sebuah pencerahan dalam arti memberikan penyadaran bahwa mereka mampu untuk memiliki sesuatu dan bahwasanya mereka mempunyai kemampuan dan

---

<sup>8</sup> Totok Mardikanto, *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014) Hal. 202



kapasitas yang luar biasa jika saja mereka mau mengeksplor dan menggali kemampuan dalam dirinya.

- b. Tahap pengkapasitasan. Yaitu tahap dimana masyarakat yang diberdayakan diberikan program kemampuan untuk membuat mereka memiliki skil dalam mengelola manajemen diri dan sumber daya yang dimiliki.
- c. Tahap Pemberian Daya. Pada tahap ini mereka diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki atau sesuai kecakapan penerima. Sehingga masyarakat menjadi mau, tau dan mampu melakukan perubahan dalam hidupnya kearah yang lebih baik.<sup>9</sup>

Pranaka dan Vidhyandika menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecendrungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecendrungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecendrungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecendrungan kedua atau kecendrungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

---

<sup>9</sup> Artikel Umum PNPM Tanjab Barat, (On-Line), tersedia di:  
<http://pnpm.tanjabbarjab.do.co.id/artikel1%20umum.html> (20 Juni 2019)

1. Mampu memahami diri dan potesinya, (mengantisipasi kondisi perubahan kedepan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

Yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tau, mengerti, paham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggung jawab.<sup>10</sup>

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan pesaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami permasalahan kemiskinan sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan

---

<sup>10</sup> Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, (On-Line), tersedia di:  
<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaanmasyarakatpengertian.html?m=1> (20 September 2019)

dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam proses ini, LSM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat.

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan ini masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.<sup>11</sup>

## **5. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.

UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang

---

<sup>11</sup> Mardikanto totok dan Poerwoko Soebiato, *Op.Cit*, h. 61-62

bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

#### 1. Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

#### 2. Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

#### 3. Kesadaran kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

#### 4. Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

#### 5. Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.<sup>12</sup>

## **B. Kemiskinan Nelayan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, **kemiskinan** adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.<sup>13</sup>

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh *Chambers* adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga.

---

<sup>12</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 138-139

<sup>13</sup> sbandi Adi, *Jurnal Kemiskinan Multidimensi Vol. 9 No. 01*, (Makara, Sosial Humaniora:2005), hal. 1

Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari *Chambers* menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi, yaitu:

1) Kemiskinan (*Proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

#### 5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.<sup>14</sup>

## 2. Permasalahan Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 2-3



budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Walaupun tidak ada data yang pasti, karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang di dunia, yaitu sekitar 81.000 km

Beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Bahkan menurut Retno dan Santiasih, jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin.

Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu entitas tunggal. Mereka terdiri dari beberapa kelompok, yang dilihat dari segi pemilikan alat tangkap dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: nelayan buruh, nelayan juragan, dan nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Dari ketiga jenis nelayan tersebut, pada umumnya nelayan juragan tidak miskin. Kemiskinan cenderung dialami oleh nelayan perorangan dan buruh nelayan. Oleh karena kedua jenis kelompok nelayan itu jumlahnya mayoritas, maka citra tentang kemiskinan melekat pada

kehidupan nelayan. Citra kemiskinan nelayan itu sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya.

Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan, karena nelayan merupakan ujung tombak pengelola perikanan di Indonesia. Mengingat laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga lahan di daratan akan dirasakan semakin sempit, maka matapencarian sebagai nelayan diharapkan menjadi tumpuan harapan di masa depan. Untuk itu di masa depan masyarakat secara berangsur-angsur diharapkan terdorong untuk mengalihkan kegiatan ekonominya ke arah laut. Adanya kemiskinan yang dialami oleh nelayan, pengalihan kegiatan ekonomi ke laut dikhawatirkan sulit terjadi, sebab para anak nelayan pun dikhawatirkan tidak tertarik lagi untuk menekuni pekerjaan kenelayanan. Jika hal itu terjadi, maka kegiatan di darat akan semakin padat, sedangkan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya akan sia-sia. Agar yang demikian itu tidak terjadi, dibutuhkan perhatian dari semua pihak terhadap nasib para nelayan. Perhatian itu tentunya bukan sekedar dalam bentuk empati, melainkan lebih dari itu, yaitu mencari alternatif yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> <http://theprakarsa.org/indeks-kemiskinan-multidimensi-memotret-wajah-wajah-kemiskinan-di-indonesia/> diakses pada 14 September 2019 pukul 10.55 WIB

### 3. Dimensi Kemiskinan Nelayan

Walaupun banyak definisi tentang kemiskinan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Dalam kaitan itu, kondisi serba kekurangan itu bisa saja diukur secara obyektif, dirasakan secara subyektif, atau secara relatif didasarkan pada perbandingan dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan obyektif, subyektif dan relatif tentang kemiskinan. Selain itu, kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya dan politik.

Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Dalam kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi itu secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah. Begitu pula kondisi pendidikan yang juga rendah.

Adapun secara kuantitatif, kemiskinan yang dialami nelayan itu antara lain dapat dilihat pada pengakuan seorang buruh nelayan *slerek* di Muncar, Jawa Timur, yang rata-rata pendapatan per bulannya hanya sekitar Rp 250.000,- - Rp 400.000,- per bulan. Bahkan beberapa nelayan mengaku pendapatannya lebih kecil dari itu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Masyhuri Imron, *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*, Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003 hal. 65

Dalam dimensi sosial budaya, kemiskinan memang tidak dapat dihitungkan dengan angka-angka, namun muncul dalam bentuk budaya kemiskinan. Lewis misalnya, menyatakan adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis. Walaupun tidak seluruhnya benar, kondisi yang demikian itu juga dialami oleh masyarakat nelayan.

Kecenderungan untuk membeli barang-barang konsumtif pada saat banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh paling tidak telah mendukung kebenaran tesis yang dikemukakan oleh Lewis tersebut. Kecenderungan semacam itulah yang oleh sementara pihak dipandang sebagai sikap boros, karena tidak menyimpan kelebihan uangnya untuk tabungan yang bisa digunakan pada saat musim paceklik. Begitu pula sikap apatis terhadap program-program pemerintah juga melanda kehidupan nelayan, karena terlalu sering dieksploitasi oleh pihak luar untuk kepentingan mereka. Akibatnya mereka sulit untuk percaya terhadap program-program yang diperkenalkan, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh pihak lain, kecuali sudah terbukti membawa manfaat bagi mereka. Ini terjadi karena banyak program yang selama ini tidak membawa implikasi bagi perbaikan ekonomi mereka. Perasaan tidak berdaya juga muncul di kalangan ini, terutama dalam menghadapi ulah para pedagang ikan yang menentukan harga secara sepihak.

Adapun dalam dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirnnya kelompok miskin dalam struktur sosial yang di bawah, dan tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam masyarakat

nelayan, hal itu muncul dengan termarginalisasinya kelompok ini, sehingga tidak mempunyai akses misalnya terhadap lembaga keuangan. Begitu pula dalam program-program untuk perbaikan kelompok ini, mereka tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh orang luar yang merasa tahu atas permasalahan mereka; walaupun secara riil masyarakat miskin itulah yang sebetulnya merasakan dan tahu persis permasalahan yang dihadapi.

Dilihat dari lingkupnya, kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan juga bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat dilihat pada prasarana fisik yang tersedia di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar, dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standard.

Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga tidak tersedianya air bersih misalnya, memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka atau jika tidak membeli, mereka terpaksa harus membuang waktu untuk mendapatkan air bersih, yang berarti mengurangi waktu yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Begitu pula lokasi yang jauh dari pasar, membuat mereka harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar untuk menjual hasil tangkapan, atau harus merelakan hasil tangkapannya dibeli oleh tengkulak dengan harga murah bahkan di bawah harga pasar. Pos pengeluaran untuk bahan bakar pengoperasian perahu juga membesar karena tidak

memiliki akses pembelian bahan bakar secara langsung ke tempat-tempat penjualan resmi. Karena itu kemiskinan prasarana bisa mengakibatkan keluarga yang berada di garis kemiskinan (*near poor*) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin. Chambers, sebagaimana yang dikutip oleh Loekman Soetrisno menyebutkan adanya dua hal utama yang terkandung dalam kemiskinan, yaitu kerentanan dan ketidak-berdayaan, yang sering mengakibatkan orang miskin menjadi lebih miskin.

Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Ini dapat dilihat pada nelayan perorangan misalnya, mengalami kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan melaut, karena sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual, dan tidak ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan yang mendesak. Belum lagi jika ada salah satu anggota keluarga yang sakit. Hal yang sama juga dialami oleh nelayan buruh, mereka merasa tidak berdaya di hadapan para juragan yang telah mempekerjakannya, walaupun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.

Beberapa faktor dan situasi tersebut telah membuat terpuruknya masyarakat nelayan dalam jerat kemiskinan. Hal lain yang juga memperparah keadaan mereka adalah adanya keterbatasan teknologi kenelayanan, terjatuhnya mereka dalam hutang, dan adanya keterbatasan dalam pemasaran hasil tangkapan.<sup>17</sup>

#### **a. Keterbatasan Teknologi Sebagai Pemicu Awal Kemiskinan**

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 70

Satu hal penting dalam kehidupan nelayan adalah teknologi penangkapan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (perahu). Ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi, karena selain kondisi sumber daya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga untuk menangkapnya nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air.

Dari segi jenisnya, teknologi penangkapan dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang bersifat tradisional dan modern. Ukuran modernitas itu bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Selain itu, wilayah tangkap juga menentukan ukuran modernitas suatu alat. Teknologi penangkapan yang modern akan cenderung memiliki kemampuan jelajah sampai di lepas pantai (*off shore*), sebaliknya yang tradisional wilayah tangkapnya hanya terbatas pada perairan pantai. Penggunaan teknologi yang berbeda itulah yang memunculkan konsep nelayan tradisional dan nelayan modern. Tidak dipungkiri, sebenarnya para nelayan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan pendapatannya melalui usaha peningkatan teknologi.

Dengan demikian, pemilikan teknologi yang eksploitatif sifatnya, yaitu yang paling efektif dan efisien bisa dikatakan merupakan obsesi dari setiap orang yang menekuni pekerjaan sebagai nelayan. Akan tetapi, hal demikian tidak selamanya bisa dilakukan. Hal ini karena terkait dengan faktor modal yang relatif besar, yang sangat mempengaruhi tingkat teknologi yang dimiliki oleh nelayan. Nelayan yang memiliki modal besar akan dapat membeli alat tangkap yang lebih bervariasi

dengan tingkat eksploitasi yang lebih besar dibandingkan nelayan dengan modal yang kecil. Lebih parah lagi jika nelayan itu tidak punya modal, justru akan menempatkannya dalam posisi hanya sebagai buruh nelayan.

Pada umumnya para nelayan masih mengalami keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana, wilayah operasi pun menjadi terbatas, hanya di sekitar perairan pantai. Selain itu juga ketergantungan terhadap musim sangat tinggi, sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun melaut, terutama pada musim ombak, yang bisa berlangsung sampai lebih dari satu bulan. Akibatnya, selain hasil tangkapan menjadi terbatas, dengan kesederhanaan alat tangkap yang dimiliki, pada musim tertentu tidak ada hasil tangkapan yang bisa diperoleh. Kondisi ini merugikan nelayan, karena secara riil rata-rata pendapatan per bulan menjadi lebih kecil, dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.

Masalah lain yang dihadapi dengan teknologi yang sederhana tersebut adalah sifat sumber daya perikanan, yang merupakan sumberdaya milik umum (*common property resources*). Dengan konsep kepemilikan yang seperti itu, yang mengandung arti bahwa sumberdaya itu bukan milik siapa-siapa, karena tidak ada seorangpun yang berhak menguasainya, namun di sisi lain sumber daya yang demikian mengandung arti bahwa semua orang memiliki hak untuk mengeksploitasinya. Akibatnya adalah setiap orang akan berlomba untuk melakukan penangkapan sumberdaya perikanan sebanyak-banyaknya, karena jika itu tidak dilakukan, sumberdaya yang sama akan ditangkap pula oleh orang lain.



Akibatnya persaingan antara para nelayan dalam memperebutkan sumberdaya tidak dapat dielakkan. Karena itu dalam bidang perikanan berlaku prinsip *first come first own*. Artinya, siapa yang datang paling dulu maka dialah yang paling berpeluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak di tempat itu. Akibat dari perebutan sumberdaya itu maka nelayan dengan teknologi yang lebih rendah cenderung akan kalah dalam persaingan. Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi oleh nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian, tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan. Permasalahannya adalah selain minimnya hasil tangkapan dengan alat tangkap sederhana, sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para juragan juga cenderung kurang menguntungkan nelayan buruh.

Dalam beberapa kasus, dan ini yang paling sering terjadi, bagi hasil itu dilakukan dengan sistem *fifty-fifty*, yaitu sesudah hasil tangkapan dijual dan dikurangi untuk biaya operasi, sisanya dibagi dua antara buruh nelayan dengan juragannya. Sistem bagi hasil seperti itu sepintas memang kelihatan adil. Namun jika dicermati lebih jauh sistem bagi hasil yang demikian sebetulnya sangat timpang. Memang benar nelayan buruh dapat bagian setengah seperti yang diperoleh juragan, tetapi pada nelayan buruh, pendapatan yang setengah itu harus dibagi lagi dengan banyaknya anggota yang ada. Jika dalam satu kelompok penangkapan terdiri dari enam anggota, maka dapat dipastikan bahwa pendapatan buruh hanyalah seperenam dari pendapatan juragan. Artinya, semakin besar

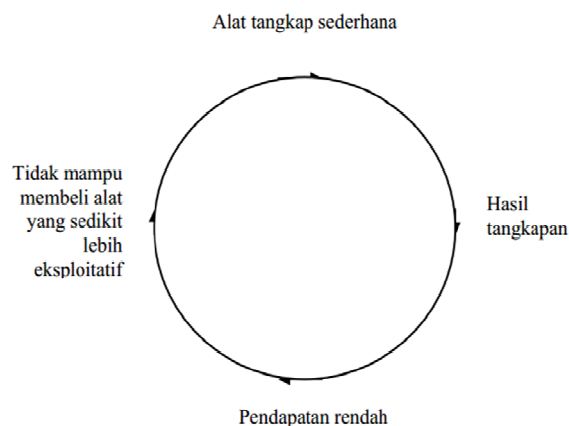
anggota kelompok penangkapan yang dimiliki, maka ketimpangan dalam bagi hasil itu semakin besar.

Sistem bagi hasil yang timpang itu pada kasus-kasus tertentu masih diperparah dengan kewajiban nelayan untuk ikut serta menanggung penggantian alat baru, jika terjadi kerusakan. Ini dapat dilihat pada sistem bagi hasil yang diterapkan pada perahu *slerek* di Muncar misalnya, jika terjadi kerusakan mesin ataupun jaring, dan ternyata tidak dapat diperbaiki, maka anggota *slerek* harus ikut menanggung setengah bagian dari harga pembelian mesin atau jaring yang diganti. Hal yang sama juga terjadi pada nelayan *purse seine* di Rembang. Lebih dari itu, para buruh *purse seine* di Rembang juga harus ikut menanggung biaya penyusutan alat tangkap yang dimiliki oleh juragan. Hal itu tentu saja tidak *fair*, karena alat yang dibeli itu sepenuhnya menjadi milik juragan, dan para buruh tidak ikut memilikinya. Dengan pembebanan penggantian alat baru, ditambah dengan keharusan untuk menanggung biaya penyusutan yang tentunya masuk ke kantong juragan, maka pendapatan para buruh akan menjadi semakin kecil, sebaliknya pendapatan juragan akan semakin besar. Itulah sebabnya kondisi ekonomi antara nelayan juragan dan buruh terdapat kesenjangan yang sangat besar.

Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, selain perlu perbaikan cara bagi hasil, para buruh nelayan perlu dibantu untuk dapat memiliki alat tangkap sendiri. Sedangkan para nelayan tradisional yang bersifat perorangan, juga perlu dibantu agar dapat meningkatkan alat tangkapnya.

Jika itu tidak dilakukan, maka kedua kelompok nelayan tersebut akan sulit meningkatkan pendapatannya, karena terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu dapat digambarkan sebagai berikut. Karena miskin, buruh nelayan tidak dapat membeli alat tangkap, dan nelayan perorangan tidak dapat meningkatkan kualitas alat tangkapnya. Akibatnya, pendapatan buruh nelayan akan tetap rendah karena tergantung pada bagi hasil yang timpang, dan pendapatan nelayan perorangan juga rendah karena hasil tangkapan yang sedikit. Pendapatan yang rendah itu selanjutnya menyulitkan mereka untuk dapat menyisihkan uang untuk membeli alat tangkap dengan tingkat eksploitasi yang tinggi.

### Skema Lingkaran Kemiskinan Nelayan



### b. Jeratan Hutang Sebagai Roda Penggerak Kemiskinan

Pada umumnya terdapat kesadaran yang dimiliki oleh nelayan, bahwa untuk meningkatkan pendapatan maka usaha pertama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan teknologi kenelayanan. Peningkatan teknologi itu dilakukan melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi alat tangkap

berarti nelayan perlu memiliki alat tangkap yang tingkat eksploitasinya lebih tinggi daripada alat tangkap yang telah dimiliki. Sedangkan ekstensifikasi berarti nelayan perlumemperbanyak jenis alat tangkap yang dimiliki, sehingga bisa menangkap berbagai jenis sumberdaya. Kemampuan untuk meningkatkan peralatan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seorang nelayan. Sesuai dengan kondisi ekonominya, peralatan yang mampu dibeli adalah peralatan yang sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali, sehingga menempatkan kedudukannya tetap sebagai buruh nelayan. Karena itu untuk mengembangkan variasi alat tangkap yang dimiliki bukan hal yang mudah dilakukan. Akibatnya, kemampuan untuk meningkatkan hasil tangkapan menjadi sangat terbatas. Kondisi ini mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan untuk dapat melepaskan diri dari kemiskinan, karena kemiskinan yang dialami oleh para nelayan tersebut telah menjadi semacam *lingkaran setan*.

Beberapa pilihan ditempuh nelayan dalam menghadapi kemiskinannya. Pilihan pertama adalah tetap bertahan sebagai nelayan, dengan menggunakan alat tangkap yang telah dimilikinya. Pilihan pertama ini membawa akibat yang serius, yaitu produktivitas penangkapan tidak bisa ditingkatkan, sehingga nelayan tetap terjebak dalam kungkungan kemiskinan. Pilihan kedua dilakukan dengan cara berusaha meningkatkan produktivitasnya, baik melalui cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi. Pilihan kedua ini pada umumnya sulit dilakukan, karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, pilihan ketiga sangat terbuka bagi nelayan, yaitu berusaha meningkatkan produktivitas dengan cara yang dianggap

murah, tetapi tingkat eksploitasinya sangat tinggi. Celakanya, pilihan ini cenderung merusak lingkungan, karena dilakukan dengan pengeboman ataupun penggunaan potassium. Bagi nelayan yang tidak mungkin untuk memilih ketiga opsi tersebut, mereka cenderung akan memilih opsi keempat, yaitu selain tetap sebagai nelayan, juga mencari pekerjaan alternatif lain, sehingga pendapatannya diharapkan dapat meningkat. Akan tetapi, tidak semua nelayan dapat melakukan kedua jenis kegiatan itu secara bersamaan. Hal ini karena pekerjaan di laut sudah banyak menyita waktu, sehingga menyulitkannya untuk melakukan pekerjaan lain di darat; kecuali jika dilakukan di musim paceklik, di saat mereka sedang tidak melakukan kegiatan melaut.

Oleh karena itu, bagi nelayan yang demikian, mereka akan meninggalkan sama sekali pekerjaan sebagai nelayan, dan beralih ke pekerjaan lain di darat, walaupun tidak jarang bekerja di darat juga berakhir dengan keputus-asaan, karena mereka pada umumnya tidak memiliki keahlian untuk itu. Akibatnya pekerjaan darat yang bisa mereka lakukan umumnya juga terbatas pada pekerjaan kasar, seperti menjadi tukang becak, tukang batu, serta pekerjaan lain yang sejenis, yang hasilnya tidak lebih besar dibandingkan jika tetap sebagai nelayan.

Nelayan yang memilih opsi kedua, yaitu berusaha meningkatkan produktivitas kenelayanan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi alat tangkap, satu-satunya jalan yang ditempuh untuk menutupi kekurangan modal adalah dengan mencari modal pinjaman. Namun untuk mendapatkan pinjaman bukan hal yang mudah, karena lembaga keuangan yang resmi seperti BRI tidak cukup membuka akses pada nelayan untuk mendapatkan modal dalam pengadaan

alat tangkap, karena ketiadaan agunan. Karena itu jalan yang ditempuh oleh nelayan adalah mencari pemilik modal yang mau meminjamkan modalnya kepada nelayan, walaupun tanpa harus menyediakan agunan. Ironisnya, mereka adalah para pedagang ikan yang tentu saja mengharapkan keuntungan dari peminjaman uang yang diberikan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa keuntungan yang ingin diraih dari para nelayan itu bukan pada bunga atas pinjaman, melainkan pada upaya mendapatkan komoditi ikan dengan cara yang mudah dan dengan harga yang murah. Hal itu dilakukan dengan cara pemilik modal (*money lender*) mengharuskan nelayan peminjam untuk menjual ikan hasil tangkapan kepadanya, dan penentuan harga ikan dilakukan secara sepihak, dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar. Menghadapi situasi demikian, nelayan peminjam tidak bisa berbuat lain kecuali mengikuti keinginan pemilik modal. Hanya dengan cara itulah yang bisa dilakukan untuk mendapatkan dana. Pelanggaran terhadap hal itu bisa membawa akibat yang serius, yaitu alat tangkap disita, atau nelayan diharuskan melunasi pinjamannya dengan segera. Keadaan seperti itu menempatkan nelayan peminjam berada pada posisi yang lemah. Adanya keharusan untuk menjual hasil tangkapan ke pemilik modal yang telah meminjamkan uangnya, di satu sisi memang menguntungkan nelayan peminjam, karena hal itu berarti adanya kesiapan dari pemilik modal untuk menampung penjualan hasil laut dari nelayan peminjam. Dengan demikian nelayan peminjam tidak mengalami kesulitan untuk menjual hasil tangkapannya, karena sudah ada yang menampungnya.

Bagi nelayan, kemudahan menjual hasil tangkapan itu merupakan hal penting, karena di samping sifat ikan yang tidak tahan lama, terbatasnya waktu yang dimiliki telah mengakibatkan para nelayan pada umumnya mengalami kesulitan untuk menjual sendiri hasil tangkapannya ke pasar. Konsekuensi dari keadaan itu, tidak ada posisi tawar dari nelayan terhadap apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal, kecuali menjual hasil tangkapan yang lebih murah bahkan di bawah harga pasar. Keadaan itu pula yang menyebabkan pendapatan nelayan peminjam sulit berkembang dengan maksimal.

Untuk memaksimalkan keuntungan, para nelayan peminjam, terutama yang sudah meningkat statusnya sebagai juragan pemilik perahu, kadang juga merangkap sebagai pedagang perantara. Proses ekonomipun terulang yaitu adanya keharusan untuk menjual hasil tangkapan perahu kepadanya, yang nantinya akan dijual kepada pedagang yang telah meminjami modal. Mekanisme mencari untung seperti itu menyebabkan jumlah nilai rupiah penjualan hasil laut dari para awak perahu menjadi lebih kecil, sehingga pembagian hasil yang diterima oleh para awak perahu menjadi lebih rendah. Melihat kondisi tersebut, jelas bahwa yang paling dirugikan dengan peminjaman modal kepada pedagang adalah para nelayan pada lapisan paling bawah. Bagi mereka, praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh juragan telah menjadi *poverty rackets* (roda penggerak kemiskinan), sehingga menjerat mereka dalam kesulitan ekonomi yang lebih dalam. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh para pemilik modal dalam usaha memaksimalkan keuntungan, telah dilakukan dengan cara menarik kerugian dari para nelayan. Mengacu pada pendapat Scott ini

menunjukkan bahwa telah terjadi praktek eksploitasi dari pemilik modal terhadap nelayan peminjam.

Walaupun hubungan antara nelayan peminjam dengan pemilik modal diwarnai oleh unsur eksploitasi, namun adanya bantuan pinjaman maka ekonomi mereka juga meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, pada saat masih menjadi buruh nelayan atau menjadi nelayan perorangan. Oleh karena itu walaupun harga jual hasil laut dari nelayan peminjam ke pemilik modal ditentukan secara sepihak dengan harga yang relatif rendah, namun para buruh nelayan tetap mengharapkan untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari pemilik modal (walaupun itu tidak mudah). Hanya dengan cara demikian mereka dapat meningkatkan statusnya menjadi juragan, yang berarti akan dapat meningkatkan status ekonomi mereka.

Kondisi yang dialami oleh para buruh nelayan itulah yang memunculkan sosok nelayan sebagai nelayan miskin, karena sebagian besar nelayan adalah mereka yang berstatus sebagai buruh nelayan, atau sebagai nelayan perorangan, dengan alat tangkap tradisional. Sementara nelayan juragan (yang meningkat statusnya karena pinjaman modal), adalah nelayan yang tetap tidak mengalami kemandirian, karena hidup matinya tergantung pada pemilik modal. Untuk itu seorang juragan terpaksa mengorbankan sebagian pendapatan yang seharusnya diperoleh kepada pemilik modal. Kondisi kemiskinan yang dialami, didukung oleh tidak adanya akses terhadap lembaga keuangan yang dimiliki oleh para nelayan, maka para nelayan sebetulnya telah siap untuk dieksploitasi oleh pemilik



modal. Kesiapan untuk dieksploitasi itulah yang mengakibatkan tetap terjalinnya hubungan yang baik antara para nelayan dengan pemilik modal.<sup>18</sup>

### **C. Teori Konstruksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan**

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Dalam menjelaskan paradigma konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yg bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.<sup>19</sup>

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, mereka menggambarkan bahwa, konstruksi sosial merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi, dimana individu-individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas atau kenyataan yang dimiliki dan dialaminya.

Konstruksi sosial merupakan suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek di luar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana

---

<sup>18</sup> Masyhuri Imron, *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*, Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003 hal. 67-74

<sup>19</sup> Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, (Surabaya: Insan Cendekia.2002) hal. 30

individu tersebut menjadi anggotanya. Sedangkan, Objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.<sup>20</sup>

Di dalam eksternalisasi, individu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dalam moment adaptasi tersebut, sarana yang digunakan bisa berupa bahasa maupun tindakan. Manusia menggunakan bahasa untuk melakukan adaptasi dengan dunia sosiokulturalnya dan kemudian tindakannya juga disesuaikan dengan dunia sosiokulturalnya. Pada moment ini, terkadang dijumpai orang yang mampu beradaptasi dan juga mereka yang tidak mampu beradaptasi. Penerimaan dan penolakan tergantung dari apakah individu tersebut mampu atau tidak beradaptasi dengan dunia sosiokultural tersebut.

Di dalam internalisasi yang merupakan moment penarikan realitas sosial ke dalam diri atau realitas sosial menjadi realitas subjektif. Realitas sosial itu berada di dalam diri manusia dan dengan cara itu, maka diri manusia akan teridentifikasi di dalam dunia sosiokulturalnya. Individu akan berusaha mengambil peran di dalam masyarakat dengan mengikuti kegiatan sosial di dalamnya, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara dirinya dengan masyarakat pada umumnya, dan individu akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Sehingga individu dapat dikatakan bahwa dirinya telah mengidentifikasi diri dengan lingkungan sosiokulturalnya.

Di dalam objektivasi, di mana individu akan berusaha untuk berinteraksi dengan dunia sosiokulturalnya. Di dalam objektivasi, realitas sosial tersebut

---

<sup>20</sup> Peter L Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, (Jakarta : LP3S, 1990). Hal. 5

seakan-akan berada di luar diri manusia. Ia menjadi realitas objektif, sehingga dirasa akan ada dua realitas, yaitu: 1) realitas yang berada di dalam diri atau yang subjektif, dan 2) realitas yang berada di luar diri atau yang objektif. Dua realitas tersebut membentuk jaringan intersubjektif melalui proses pelebagaan atau institusionalisasi. Pelebagaan atau institusionalisasi yaitu, proses untuk membangun kesadaran menjadi tindakan. Di dalam proses pelebagaan tersebut, nilai-nilai yang menjadi pedoman di dalam melakukan interpretasi terhadap tindakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan, sehingga apa yang disadari adalah apa yang dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut Peter Berger dalam buku sebuah pengantar ringkas karangan Hanneman Samuel mengemukakan:<sup>22</sup>

“untuk memahami realitas dari masyarakat secara memadai perlu diketahui proses bagaimana realitas ini terbentuk”. Berger mendasarkan diri pada dua gagasan sosiologi pengetahuan, yaitu “realitas” dan “pengetahuan”. “Realitas” mereka artikan sebagai kualitas yang melekat pada fenomena yang kita anggap berada di luar kehendak kita. Maksudnya, “realitas” merupakan fakta sosial yang bersifat eksternal, umum, dan mempunyai kekuatan memaksa kesadaran masing-masing individu. Terlepas dari individu itu suka atau tidak, mau atau tidak, “realitas” tetap ada (jadi, realitas yang bersifat objektif). Sedangkan, “Pengetahuan” diartikan sebagai keyakinan bahwa suatu fenomena riil dan mereka mempunyai karakteristik tertentu. Maksudnya, pengetahuan merupakan realitas yang hadir dalam kesadaran individu (jadi, realitas yang bersifat subjektif).

Terbentuknya realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari adanya interaksi sosial, dimana setiap interaksi yang dilakukan oleh masyarakat menghasilkan makna-makna di dalam masyarakat itu sendiri. Dari

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hal. 31

<sup>22</sup> Hanneman Samuel. *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. (Depok: Kepik. 2012), hal 5

interaksi tersebut secara bersama masyarakat memaknai sesuatu yang kemudian di dalam masyarakat disebut sebagai realitas sosial. Realitas sosial itu sendiri terbentuk bukan dari satu atau dua makna yang dibentuk oleh manusia itu sendiri, tetapi realita sosial terbentuk akibat masyarakat membentuk makna secara bersama yang muncul akibat adanya interaksi sosial dan apa yang pernah dialaminya yang kemudian ditetapkan dengan kesepakatan bersama mengenai makna dari realitas tersebut.

Pemikiran Berger dan Luckmann mengenai konstruksi realitas secara sosial berasal dari pemikiran aliran konstruktivisme. Aliran konstruktivisme menghubungkan pengetahuan yang dimiliki manusia dengan realitas yang dialami manusia. Realitas merupakan fakta sosial, dimana fakta sosial merupakan cara bertindak, berfikir, bersifat eksternal dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial dimana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sedangkan pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari realita yang ada di lingkungannya.

Selain itu, dalam konstruksi realitas sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckmann, terdapat hubungan antara realitas kehidupan sehari-hari, interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, serta bahasa dan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Berger dan Luckmann berusaha menjelaskan bahwa realitas terbentuk melalui pengetahuan-pengetahuan yang dibangun oleh manusia berdasarkan pengalamannya dalam berinteraksi secara sosial secara bersama-sama

dalam kehidupan bermasyarakat. Realitas yang terbentuk sebagai sebuah kenyataan dimaknai oleh Berger dan Luckmann sebagai sesuatu yang bersifat objektif, atau dipahami oleh semua orang sesuai dengan apa adanya, sedangkan pengetahuan manusia adalah sesuatu yang subjektif, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia berbeda-beda sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Realitas kehidupan sehari-hari merupakan kenyataan yang dilakukan sebagai totalitas sehari-hari. Misalnya realitas kekampus. Realitas tersebut merupakan totalitas yang teratur baik dari segi waktu, ruang, maupun objek yang ada. Dimana pergi kekampus merupakan realitas yang harus dijalani mahasiswa setiap harinya dengan adanya aturan didalamnya, seperti adanya jam dan ruang kuliah, serta buku sebagai objeknya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari cenderung untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang, seperti dalam menyelesaikan masalah, apabila seseorang mendapati masalah yang pernah dialami, mereka akan menyelesaikannya dengan cara yang sama. Realitas sosial bersifat wajar dan masyarakat dapat menerima adanya aturan-aturan tersebut meskipun bersifat menekan. Karena realitas tersebut sudah terbentuk sejak lama dan akhirnya mereka mau tidak mau harus menirama apa yang sudah menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari.

Selain realitas kehidupan sehari-hari, konstruksi sosial juga terbentuk akibat dari adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dijelaskan diawal. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya interaksi antara individu dengan individu atau dengan masyarakat. Di mana interaksi ini juga merupakan wujud dari realitas sosial sehari-hari. Di dalam

berinteraksi seseorang akan mendapatkan kesamaan dalam beberapa kasus yang dialami masyarakat, sehingga menimbulkan adanya pemaknaan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri.

Berger menganggap bahasa memiliki kedudukan yang fundamental. Karena dengan bahasa kita dapat memaknai objek yang ada di dalam masyarakat. Tanpa bahasa kita tidak akan pernah tahu makna dari sebuah objek. Padahal di dalam realitas sosial terbentuk karena adanya peng-obyek-an, adanya objek yang dimaknai bersama dalam masyarakat. Yang terpenting dari objek-objek bukanlah bentuk fisiknya, tetapi makna atau maksud subjektif yang ditampilkan dalam interaksi seseorang. Sebaliknya hal-hal subjektif yang disampaikan orang lain pun hanya dapat dipahami jika ia ditampilkan dalam bentuk objek. Objek-objek yang dimaksud disini bukan hanya objek yang ada didalam masyarakat, tetapi juga objek yang menjadi pengalaman manusia, dimana melalui interaksi sehari-hari inilah terjadi pertukaran pengalaman dengan orang lain. Dengan adanya pertukaran inilah muncul stok pengetahuan yang bisa diwariskan ke generasi mendatang yang dapat dijadikan realitas sosial di masa mendatang. Orang yang memiliki stok pengetahuan, mereka dapat menanggulangi masalah yang dihadapi dengan pengetahuan yang ia miliki sebelumnya yang menjadi realitas sosial.

Dalam konstruksi realitas sosial terdapat dua bentuk realitas sosial yaitu, masyarakat sebagai realitas objektif, dan masyarakat sebagai realitas subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang bersifat apa adanya, artinya realitas yang tidak ada dalam diri manusia itu sendiri, sebagai contoh adalah lingkungan tempat manusia itu berada. Realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri

manusia yang dikonstruksi berdasarkan pengalamannya. Sebagai contoh dari realitas subjektif adalah pandangan, penilaian, konsep, aturan, dan sebagainya.

Dari teori diatas penulis menggunakan kacamata teori konstruksi sosial dimana berdasarkan teori tersebut ketika seorang kelompok nelayan berinteraksi, bersama dalam suatu sistem sosial, seorang indikator dan masyarakat dibentuk dalam suatu proses yang berkesinambungan dan terus menerus. Pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat nelayan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan diperoleh dari proses sosial dimana pengetahuan itu adalah hasil dari konstruksi masyarakat melalui interaksi dengan orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro : Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Cholid Nurboko. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi: Aksara.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Engking Soewarman Hasan. 2002. *Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya Unggul*. Bandung: Pustaka Rosda Karya.
- Ginanjjar Kartasasmita. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Gunawan Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Hanneman Samuel. 2012 *Peter Berger: Sebuah Pengantar Ringkas*. Depok: Kepik.
- Irawan Suehartono. 1995. *Metode Penelitian Sosial Suatu Tekhnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono Kartini. 1996. *Pengantar Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Suharismi Arikunto. 1998 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjoroningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta Gramedia.
- Kusnadi. 2009. *Membela Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardikanto totok dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*



- Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peter L Berger dan Thomas Luckman. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta : LP3S.
- Rosady Ruslan. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Najiati. Agus Asmana. 2005. I Nyoman N. Suryadiputra. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – 1P.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1973. *Metodologi Research*. ( Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Totok Mardikanto. 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Wardi Bahtiar. 1997. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta : Logos

#### **On-Line Informatika Via Internet**

- Achmad Eko Wahyudi. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban*. Jurnal Skripsi 2013.
- Artikel Umum PNPM Tanjab Barat. (On-Line). tersedia di:  
<http://pnpm.tanjabbarjab.do.co.id/artikel1%20umum.html> diakses tgl 20 Juni 2019.
- Isbandi Adi. 2005. *Jurnal Kemiskinan Multidimensi Vol. 9 No. 01*. (Makara. Sosial Humaniora.
- Kemiskinan Multidimensi (On-Line). tersedia di :  
[http://theprakarsa.org/indekskemiskinan-multidimensi-memotret-wajah-wajah kemiskinan-di-indonesia/](http://theprakarsa.org/indekskemiskinan-multidimensi-memotret-wajah-wajah-kemiskinan-di-indonesia/) diakses pada 14 September 2019.
- Masyhuri Imron. *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Volume 5 No. 1 Tahun 2003.
- Neolitha Vantikasari. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan Tuna Jaya Di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten*

*Trenggelek. Jurnal Skripsi 2017.*

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat. (On-Line). tersedia di:

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaanmasyarakatpengertian.tml?m=1> diakses tgl 20 September 2019.

Rahmatul Izza. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat*. Jurnal Skripsi. 2017.

Septi Rindawati. *Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi. Vol. 2 No.3 2012